

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA OLEH FRAKSI PKS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Vittorio Dwison

Salah satu misi partai politik adalah menempatkan anggotanya dalam jabatan politik, untuk memasukkan nilai-nilai partainya berupa visi misi, platform, ke dalam kebijakan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi platform kebijakan pembangunan PKS oleh fraksi PKS di DPRD Lampung (berdasarkan fungsi (Legislasi, Anggaran, Pengawasan). Penelitian ini menggunakan teori fungsi partai politik oleh Hans Dieter Klingemann meliputi aspek konsistensi ideologis, koherensi programatik, responsivitas terhadap kepentingan publik, dan akuntabilitas publik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan dan pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menggambarkan capaian implementasi platform PKS sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal terkait SDM, posisi politik, eksternal terkait kewenangan, dan daya dukung DPRD. serta posisi politik PKS di DPRD. Aspek konsistensi ideologis, menunjukkan keselarasan ideologi yang dianut dengan platform kebijakan yang ditawarkan. Koherensi programatik capaian kategori sedang, karena belum ada rencana dan evaluasi platform. Aspek responsivitas, sekaligus fungsi representasi FPKS menjalin komunikasi intensif dengan konstituen sekaligus membuka ruang partisipasi publik. Aspek akuntabilitas FPKS mendorong anggotanya untuk senantiasa memberikan laporan kinerja kepada internal maupun kepada publik secara langsung.

Kata kunci: Platform; PKS; DPRD

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROSPEROUS JUSTICE PARTY'S DEVELOPMENT POLICY PLATFORM BY PKS FRACTION IN LAMPUNG PROVINCIAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL

By

Vittorio Dwison

One of the primary missions of political parties is to place their members in political positions to incorporate their values, vision, mission, and platform into government policies. This study aims to examine the implementation of the PKS platform by the PKS faction in the Lampung DPRD, focusing on their legislative, budgetary, and oversight functions. This research employs Hans Dieter Klingemann's theory of party functions, which encompasses ideological consistency, programmatic coherence, responsiveness to public interests, and public accountability.

A qualitative approach was used, with data collected through interviews and documentation. Informants were selected using purposive sampling, and data analysis involved data reduction, presentation, and conclusion.

The findings indicate that the implementation of the PKS platform is significantly influenced by internal and external factors, including human resources, political position, authority, and DPRD support. The study reveals that the PKS faction demonstrates ideological consistency, moderate programmatic coherence, responsiveness to constituents, and public accountability. However, the implementation of the platform is hindered by the lack of planning and evaluation. The PKS faction maintains intensive communication with constituents and encourages public participation, while also promoting accountability among its members.

Keywords: Platform; PKS; DPRD (People's Representative Council)